

**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN**  
**PENGAWASAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM DI KOTA SURABAYA**



Disusun Oleh :

RANGGA BAGUS NOVIANTO

NIM : 02112011

PRO PATRIA  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2016

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	6
1.3. Alasan Pemilihan Judul	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat penelitian	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Pendekatan Masalah	12
1.8. Sumber Bahan Hukum	13
1.9. Pertanggung Jawaban Sistematika	14
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM BURUH OLEH PENGUSAHA	16
2.1. Sejarah Upah Minimum	16
2.2. Kewenangan pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Upah Minimum Terhadap Buruh Oleh Pengusaha	25
2.3. Proses penyelesaian Sengketa Perselisihan Hak Buruh	32
BAB III SANKSI BAGI PENGUSAHA YANG MEMBERIKAN UPAH DIBAWAH KETENTUAN PEMERINTAH	44

3.1.	Pengertian Sanksi	44
3.2.	Macam-Macam Sanksi	45
3.2.	Sanksi Bagi Pengusaha Yang Memberikan Upah Dibawah Ketentuan Pemerintah	52
BAB IV PENUTUP		55
4.1.	Kesimpulan	55
4.2.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		58



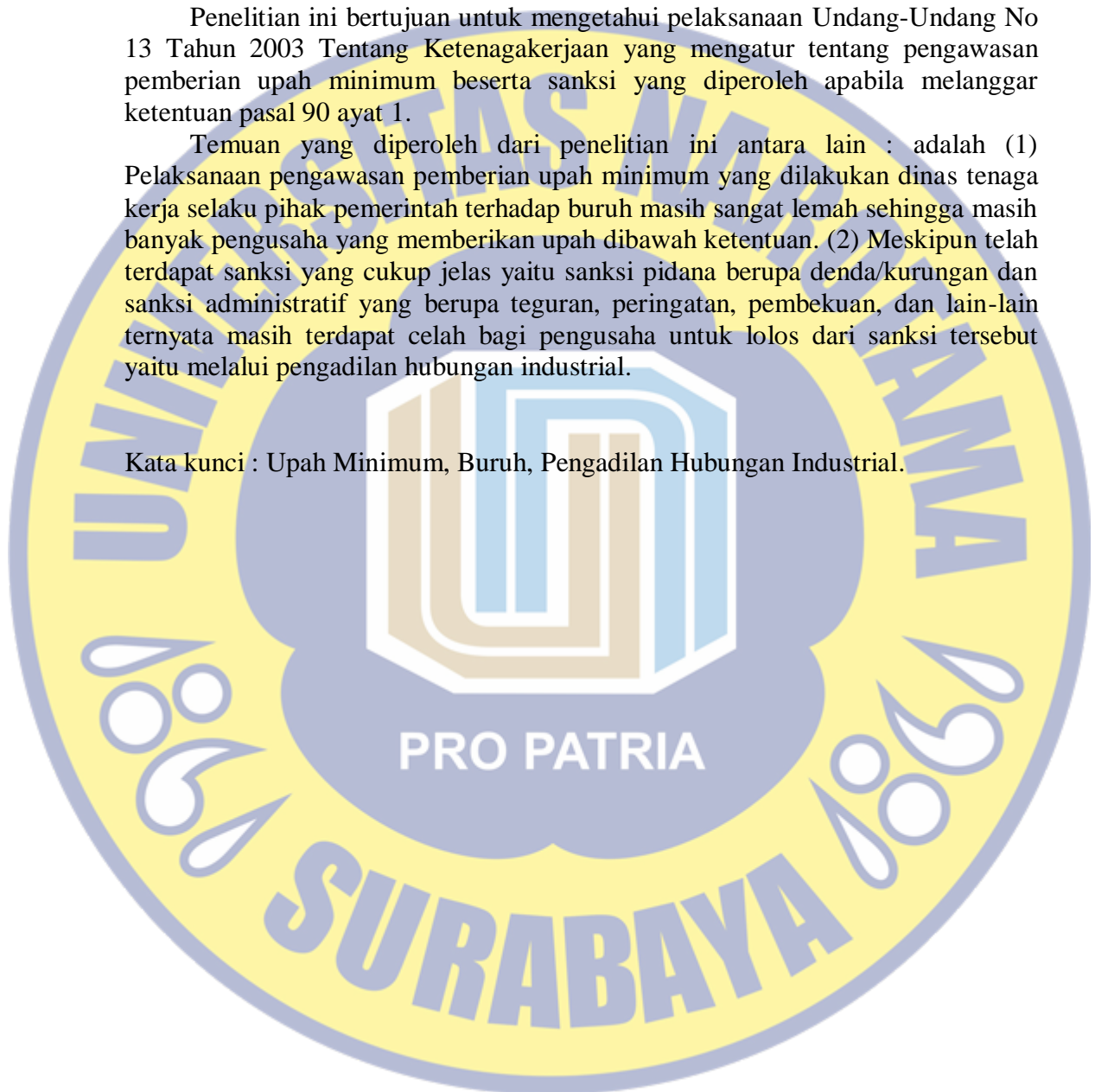
## ABSTRAK

RANGGA BAGUS NOVIANTO (02112011), Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Pemberian Upah Minimum Di Kota Surabaya, dengan dosen pembimbing Widyawati Boediningsih, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengawasan pemberian upah minimum beserta sanksi yang diperoleh apabila melanggar ketentuan pasal 90 ayat 1.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Pelaksanaan pengawasan pemberian upah minimum yang dilakukan dinas tenaga kerja selaku pihak pemerintah terhadap buruh masih sangat lemah sehingga masih banyak pengusaha yang memberikan upah dibawah ketentuan. (2) Meskipun telah terdapat sanksi yang cukup jelas yaitu sanksi pidana berupa denda/kurungan dan sanksi administratif yang berupa teguran, peringatan, pembekuan, dan lain-lain ternyata masih terdapat celah bagi pengusaha untuk lolos dari sanksi tersebut yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci : Upah Minimum, Buruh, Pengadilan Hubungan Industrial.



## **ABSTRACT**

*RANGGA BAGUS NOVIANTO (02112011), Thesis Title: Authority of the Government of Implementation Monitoring Granting Minimum Wage In the city of Surabaya, with the supervisor Widyawati Boediningsih, S.H, M.H.*

*This study aims to investigate the implementation of Law No. 13 of 2003 on Manpower governing the supervision of minimum wage and penalties were obtained when violating the provisions of article 90 paragraph 1..*

*The findings obtained from this study include: (1) the implementation of minimum wage monitoring undertaken labor offices as part of the government against the workers is still very weak, so there are still many employers who provide wages under the terms. (2) Although there has been quite clear that sanctions are criminal sanctions such as fines / imprisonment and administrative sanctions in the form of a reprimand, warning, freezing, and others it turns out there is still room for entrepreneurs to get away from these penalties, namely through labor court.*

*Keywords: Minimum Wage, Labour, Industrial Relations Court*





## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari kedua rumusan masalah diatas maka dapat di ambil dua kesimpulan yaitu:

1. Pasca otonomi daerah pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga dalam penetapan dan pengawasan pemberian upah minimum, dinas ketenagakerjaan atau disnaker memiliki peranan, kewajiban, dan hak penuh untuk melindungi pemberian upah minimum. Namun terjadinya pelanggaran hak-hak normatif buruh seperti pembayaran upah di bawah ketentuan pemerintah sesungguhnya merupakan *afirmasi* atau penegasan bahwa lemahnya kinerja pengawas atau penyidik ketenagakerjaan. Secara normatif, pengawas ketenagakerjaan bertugas untuk menjamin penegakkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan sehingga hubungan industrial dapat berjalan secara proporsional dan demokratis. Namun dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 membuat disnaker di tingkat Kabupaten atau Kota tidak memiliki wewenang sama sekali sehingga

membuat pengawasan pemberian upah minimum menjadi terhambat dan menjadi tidak optimal

2. Kemudian pemberian sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha yang melanggar ketentuan yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan masih terdapat celah yang dapat dilewati oleh pengusaha sehingga dapat terhindar dari pemberian sanksi tersebut ditambah dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tersebut membuat buruh semakin dirugikan.

#### **1.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat dua saran yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Pengawasan haruslah dilihat sebagai sebuah sistem penegakan hukum dan bukan sekedar aparat negara yang menjalankan wewenang terbatas sehingga harus lebih progresif untuk memajukan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja atau buruh yang akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha dan dapat mendidik pengusaha maupun buruh untuk selalu taat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan akan tercipta suasana lingkungan kerja yang harmonis. Serta perlu sebuah revisi atau peninjauan kembali terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah terutama di bidang pengawas ketenagakerjaan yang sesuai dengan lampiran huruf g supaya dapat tercipta suatu pengawasan yang melindungi pihak buruh secara merata dan secara optimal.

2. Perlu adanya sebuah revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan dalam hal pemberian sanksi supaya dapat lebih tegas dan lebih merata dan tidak ada celah lagi bagi pengusaha untuk menghindari pemberian sanksi tersebut sehingga dapat menimbulkan efek jera pada pihak pengusaha.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2007. *Pengantar Hukum Perburuhan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2006. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*. Bandung: PT Citra Aditya Sakti
- Alan J. Boulton. 2002. *Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional
- Eko wahyudi. *Et al.* 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ikhwan Fahrojih. 2016. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Setara Press
- Iman Soepomo. 1975. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta : Djambatan
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- \_\_\_\_\_. 1994. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press
- Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press
- Surya Jandra *et all.* 2007. *Advokasi Pengupahan Di Daerah: Strategi Serikat Buruh Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: TURC
- Suhartono, "Belanja Pemerintah Jadi Pemacu", Jawa Pos, 04 Februari 2016, hlm 11
- Ugo dan Pujiyo. 2012. *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : Sinar Grafika
- Widodo Suryandono. 2014. *Asas-asas hukum perburuhan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Widyawati boediningsih. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Surabaya : Narotama University Press

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

<http://www.gajimu.com/main/pengertian-upah-minimum> (diakses tanggal 03 Februari 2016)

<http://jatimprov.go.id/read/berita-pengumuman/umk-2016-di-jatim-ditetapkan> (diakses tanggal 04 Februari 2016)

<http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-penelitian-tujuan-sikap-cara.html> (di akses pada tanggal 22 Juni 2016)

<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/12/Implementasi-Upah-Minimum-Kabupaten-Dalam-Meningkatkan-Produktivitas-Perusahaan.pdf> (diakses pada tanggal 20 juli 2016)